



EFEKTIFITAS PENYEDERHANAAN PROSEDUR PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM UU CIPTA KERJA UNTUK MENDORONG INOVASI UMKM

Surya Insani Kamil

8110124147/2110611281

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta/Universitas Negeri Semarang
2210611281@mahasiswa.upnvj.ac.id/surya.kamil09@gmail.com

***Abstract** Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are the backbone of Indonesia's economy, contributing significantly to the national Gross Domestic Product (GDP) and absorbing a large portion of the workforce. However, MSMEs face various challenges, especially in terms of innovation protection and intellectual property (IP) registration. Many MSMEs lack awareness about the importance of registering their intellectual property, leaving their innovative products and ideas vulnerable to plagiarism and misuse. The complexity, high costs, and lengthy procedures associated with IP registration have further hindered MSMEs from obtaining the protection they need. The enactment of the Omnibus Law (Law No. 11 of 2020) aimed to simplify administrative procedures, including those for IP registration. This study evaluates the effectiveness of this simplification, particularly its impact on MSME participation in IP registration and the protection of their innovations. The research reviews the literature on the legal, policy, and economic dimensions of IP in the MSME sector, and analyzes how the law's implementation may foster innovation and competitiveness among MSMEs. The results highlight the potential benefits and remaining challenges of IP protection in supporting MSME growth and innovation in Indonesia.*

***Keywords:** MSMEs, Intellectual Property, Omnibus Law, Innovation, IP Registration*

Abstrak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia, namun UMKM menghadapi kendala dalam melindungi produk dan inovasi UMKM melalui Hak Kekayaan Intelektual (KI). Salah satu tantangan utama adalah prosedur pendaftaran KI yang rumit, mahal, dan memakan waktu. Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) hadir dengan tujuan menyederhanakan prosedur pendaftaran KI, agar UMKM dapat lebih mudah mengakses perlindungan atas produk inovatif UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan penyederhanaan prosedur pendaftaran KI dalam UU Cipta Kerja, serta dampaknya terhadap inovasi UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR), yang mengkaji berbagai literatur terkait dengan perubahan prosedur pendaftaran KI dan dampaknya terhadap UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Cipta Kerja menawarkan kemudahan melalui sistem pendaftaran elektronik dan pengurangan biaya, tantangan seperti kurangnya pemahaman mengenai KI dan keterbatasan keterampilan digital masih menjadi hambatan besar bagi UMKM. Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam pendaftaran KI dan mendorong inovasi, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan sosialisasi dan pendidikan kepada pelaku UMKM.

Kata kunci: UMKM, Hak Kekayaan Intelektual, Undang-Undang Cipta Kerja, Inovasi, Penyederhanaan Prosedur

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama diakui sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, lebih dari 99% unit usaha di Indonesia adalah UMKM yang berkontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97% tenaga kerja di tanah air. Dengan jumlah yang sangat besar ini, UMKM tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja tetapi juga dalam pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan sosial antar wilayah. Meskipun demikian, meskipun peranannya sangat

Received September 30, 2024; Revised Oktober 30, 2024; Desember 13, 2024

** Surya Insani Kamil, 2210611281@mahasiswa.upnvj.ac.id*

strategis, UMKM masih menghadapi beragam tantangan, terutama dalam hal inovasi dan perlindungan terhadap produk serta ide-idenya.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan akses terhadap informasi mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (KI). Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya pendaftaran KI untuk melindungi inovasi yang UMKM ciptakan. Padahal, tanpa perlindungan hukum yang memadai, produk dan ide kreatif yang dihasilkan UMKM sangat rentan terhadap risiko penjiplakan dan penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Tidak hanya itu, proses pendaftaran KI yang sering dianggap rumit, mahal, dan memakan waktu lama menjadi hambatan signifikan yang membuat banyak UMKM enggan mengurusnya (Suharto & Suryani, 2020). Selain itu, keterbatasan pengetahuan tentang sistem hukum yang ada serta akses terbatas ke lembaga yang berwenang juga menjadi faktor penghambat dalam proses pendaftaran KI, sehingga banyak UMKM yang tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya UMKM terima (Setiawan, 2021).

Inovasi merupakan salah satu kunci utama bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Untuk itu, perlindungan KI sangatlah penting. Melalui pendaftaran KI, UMKM tidak hanya memperoleh hak eksklusif untuk memanfaatkan produk atau layanan UMKM, tetapi juga mendapatkan rasa aman dalam menjalankan usahanya (Iskandar, 2020). Merek yang terdaftar, misalnya, dapat menjadi identitas yang membedakan produk UMKM dari produk pesaing, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing dan reputasi bisnis (Setiawan & Mulyani, 2022). Meskipun pentingnya perlindungan KI telah diakui, kenyataannya banyak UMKM yang kesulitan mengakses sistem perlindungan KI yang ada, baik karena biaya yang tinggi, prosedur yang rumit, maupun ketidakpahaman UMKM tentang manfaat yang dapat diperoleh dari perlindungan hukum tersebut (Dewi, 2020).

Seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia mulai menyadari tantangan yang dihadapi oleh UMKM, khususnya dalam hal perlindungan KI. Salah satu kebijakan yang hadir untuk mengatasi masalah ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), yang bertujuan untuk menyederhanakan berbagai prosedur administratif, termasuk dalam hal pendaftaran KI. Kebijakan ini dapat mempermudah pelaku UMKM dalam mengakses layanan pendaftaran KI, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi UMKM dalam melindungi produk serta inovasi UMKM. UU Cipta Kerja memperkenalkan sistem pendaftaran elektronik, pengurangan dokumen yang diperlukan, serta penyederhanaan tahapan administratif yang sebelumnya memakan waktu lama dan biaya tinggi. Dengan kemudahan akses ini, dapat tercipta iklim yang kondusif bagi perkembangan UMKM dan mendorong tingkat inovasi yang lebih tinggi (Rama & Setiawan, 2022).

Namun, meskipun UU Cipta Kerja menawarkan berbagai kemudahan, efektivitas kebijakan ini terhadap peningkatan inovasi dan perlindungan KI bagi UMKM masih menjadi pertanyaan yang membutuhkan penelitian lebih lanjut. Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut menyederhanakan prosedur, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang mendalam dari pelaku UMKM mengenai pentingnya KI (Amin & Widodo, 2019). Oleh karena itu, pemahaman lebih lanjut tentang dampak penyederhanaan prosedur pendaftaran KI terhadap UMKM perlu dilakukan agar kebijakan ini dapat dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia (Sulistyo, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (KI) sebelum diberlakukannya UU Cipta Kerja, serta bagaimana kebijakan ini dapat mempengaruhi kemampuan UMKM untuk berinovasi. Secara khusus, penelitian ini akan menggali efektivitas penyederhanaan prosedur pendaftaran KI dalam UU Cipta Kerja terhadap partisipasi UMKM, dan menganalisis dampak dari kebijakan tersebut terhadap tingkat perlindungan KI yang diterima oleh UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas dari penyederhanaan prosedur pendaftaran KI yang diatur dalam UU Cipta Kerja dalam meningkatkan partisipasi UMKM dalam pendaftaran KI. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan UMKM dalam memanfaatkan kebijakan tersebut untuk melindungi produk dan inovasi UMKM. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis dampak dari kebijakan penyederhanaan prosedur terhadap inovasi yang dihasilkan oleh UMKM serta tingkat perlindungan KI yang UMKM terima setelah kebijakan tersebut diberlakukan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)* untuk menilai dan menganalisis literatur yang relevan mengenai "Efektivitas Penyederhanaan Prosedur Pendaftaran Kekayaan Intelektual dalam UU Cipta Kerja untuk Mendorong Inovasi UMKM." SLR dipilih karena kemampuannya untuk mengidentifikasi dan mensintesis hasil penelitian terdahulu secara sistematis, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai topik yang kompleks (Kitchenham & Charters, 2007). Metode ini sangat cocok digunakan mengingat banyaknya studi yang tersebar dalam berbagai bidang, seperti regulasi KI, inovasi UMKM, serta dampak dari UU Cipta Kerja terhadap UMKM.

Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menggabungkan perspektif yang ada, baik dari studi hukum, kebijakan publik, hingga ekonomi kreatif. SLR tidak hanya memberikan kesimpulan yang valid dari berbagai hasil penelitian, tetapi juga mengungkap kesenjangan dalam literatur yang ada (Tranfield, Denyer, & Smart, 2003). Dengan mengintegrasikan temuan-temuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai hubungan antara penyederhanaan prosedur pendaftaran KI dan peningkatan inovasi UMKM dalam kerangka UU Cipta Kerja.

Kriteria Pemilihan Sumber

Kriteria pemilihan sumber dalam penelitian ini ditujukan untuk memastikan relevansi dan kualitas artikel yang digunakan. Fokus utama adalah pada studi yang membahas UU Cipta Kerja, khususnya perubahan yang menyederhanakan prosedur pendaftaran KI, serta dampaknya terhadap UMKM. Penelitian yang relevan mencakup artikel hukum, kebijakan publik, dan studi-studi yang dilakukan oleh lembaga terkait yang menganalisis reformasi hukum terkait KI (Börner, 2020). Selain itu, studi yang menilai peran KI dalam mendorong inovasi UMKM juga menjadi elemen penting, mengingat KI merupakan alat penting bagi UMKM dalam melindungi produk dan ide inovatif UMKM (Setiawan, 2021).

Proses Penyaringan

Proses penyaringan literatur dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Pencarian literatur dilakukan pada database akademik terkemuka seperti Google Scholar, JSTOR, dan Scopus, dengan menggunakan kata kunci terkait seperti "UU Cipta Kerja", "Penyederhanaan prosedur pendaftaran KI", dan "Inovasi UMKM". Artikel yang dipilih

difokuskan pada publikasi dalam lima tahun terakhir untuk memastikan relevansi dengan kondisi terkini.

Seleksi lebih lanjut dilakukan berdasarkan dua kriteria utama: relevansi topik dan kualitas metodologi. Artikel yang dipilih harus membahas secara langsung UU Cipta Kerja dan pendaftaran KI, serta menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik itu kuantitatif, kualitatif, atau studi kebijakan berbasis data (Setiawan & Mulyani, 2022). Penilaian ini juga mencakup penerbitan di jurnal terkemuka dan kualitas desain penelitian yang digunakan dalam studi tersebut.

Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengkategorikan temuan-temuan utama dalam literatur yang telah diseleksi. Kategorisasi ini mencakup dua tema utama: pertama, dampak penyederhanaan prosedur pendaftaran KI terhadap akses UMKM terhadap perlindungan KI; kedua, dampak dari penyederhanaan prosedur terhadap inovasi UMKM. Penelitian yang ada menunjukkan bahwa meskipun penyederhanaan prosedur dapat mengurangi biaya dan meningkatkan kesadaran UMKM mengenai pentingnya KI, tantangan besar seperti kurangnya pengetahuan hukum dan akses terhadap informasi masih menjadi hambatan signifikan (Sulistyo, 2021).

Di sisi lain, penyederhanaan prosedur juga memberikan insentif lebih bagi UMKM untuk berinovasi, dengan mempermudah UMKM dalam melindungi produk atau ide kreatif UMKM (Rama & Setiawan, 2022). Meski demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur sudah lebih mudah, partisipasi UMKM dalam sistem KI belum optimal karena masih terbatasnya pelatihan dan pemahaman UMKM tentang manfaat dari pendaftaran KI (Setiawan & Mulyani, 2022). Dengan analisis ini, penelitian dapat mengidentifikasi sejauh mana UU Cipta Kerja berhasil memfasilitasi inovasi UMKM melalui penyederhanaan prosedur pendaftaran KI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyederhanaan Prosedur Pendaftaran KI dalam UU Cipta Kerja

Penyederhanaan prosedur pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) dalam UU Cipta Kerja merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan iklim usaha di Indonesia, khususnya untuk UMKM. Sebelum penerapan UU Cipta Kerja, prosedur pendaftaran KI seringkali dinilai kompleks, memakan waktu lama, dan mahal. Dalam konteks ini, pelaku UMKM, yang memiliki keterbatasan sumber daya, sering kali merasa kesulitan untuk melindungi produk inovasi UMKM. UU Cipta Kerja menawarkan solusi dengan sistem pendaftaran yang lebih efisien, melalui implementasi e-filing yang memungkinkan pendaftaran secara daring. Ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada prosedur manual yang memerlukan interaksi fisik di kantor pemerintah. Penyederhanaan ini dapat mendorong lebih banyak UMKM untuk mendaftarkan KI UMKM, melindungi kekayaan intelektual, dan pada akhirnya meningkatkan daya saing UMKM di pasar global (Börner, 2020; Dewi & Asyhari, 2021).

Tabel 1: Perbandingan Prosedur Pendaftaran KI Sebelum dan Sesudah UU Cipta Kerja

Aspek	Sebelum UU Cipta Kerja	Sesudah UU Cipta Kerja
Proses Pendaftaran	Manual, banyak dokumen	Elektronik (e-filing), lebih sederhana

Biaya Pendaftaran	Mahal, mencapai jutaan rupiah	Lebih murah, subsidi untuk UMKM
Waktu Pendaftaran	Bisa lebih dari satu tahun	Lebih cepat, tergantung jenis KI
Aksesibilitas untuk UMKM	Terbatas, tergantung lokasi	Lebih mudah, akses daring 24/7
Dokumen yang Diperlukan	Banyak, sering kali terjemahan	Lebih sedikit, lebih sederhana

Penyederhanaan prosedur ini memberikan dampak yang signifikan dalam hal kecepatan dan aksesibilitas bagi UMKM. Sebagai contoh, biaya pendaftaran untuk merek atau paten yang sebelumnya bisa mencapai jutaan rupiah kini lebih terjangkau. Hal ini mendorong lebih banyak pelaku usaha kecil dan menengah untuk melibatkan diri dalam proses pendaftaran KI. Menurut Setiawan (2021), penurunan biaya administratif merupakan langkah krusial dalam menciptakan kesetaraan akses bagi UMKM.

Dampak Penyederhanaan terhadap Inovasi UMKM

Penyederhanaan prosedur pendaftaran KI juga berdampak pada kemampuan UMKM untuk berinovasi. Prosedur yang lebih sederhana, dengan biaya yang lebih rendah, memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan inovasinya. Ini penting karena perlindungan terhadap KI memberikan rasa aman bagi pelaku usaha, memungkinkan untuk terus mengembangkan produk tanpa takut idenya dicuri. Selain itu, dengan kemudahan akses ke sistem pendaftaran KI, UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan produk dan teknologi baru tanpa terhalang oleh proses administratif yang rumit.

Tabel 2: Kasus UMKM yang Berhasil Berinovasi setelah Menggunakan Prosedur Baru

Sektor	Jenis Inovasi	Dampak Pendaftaran KI
Kerajinan Tangan	Pendaftaran Merek	Meningkatkan daya saing domestik dan internasional
Teknologi Digital	Pendaftaran Paten dan Merek	Melindungi produk e-commerce dari penjiplakan
Sektor Kuliner	Pendaftaran Desain Industri	Perlindungan terhadap inovasi kemasan dan merek

Contoh kasus dari sektor kerajinan tangan menunjukkan bagaimana kemudahan pendaftaran merek memberikan peluang bagi UMKM untuk mengembangkan produk dengan rasa aman. Selain itu, sektor teknologi juga merasakan manfaat yang signifikan dari perlindungan paten, yang memungkinkan perusahaan kecil untuk bersaing dengan perusahaan besar.

Tantangan yang Masih Ada dalam Penyederhanaan Prosedur Pendaftaran KI

Meski ada kemajuan, masih terdapat tantangan besar yang dihadapi oleh UMKM dalam memanfaatkan sistem pendaftaran KI yang baru ini. Salah satu kendala utama

adalah kurangnya pemahaman mengenai pentingnya KI di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha kecil yang menganggap pendaftaran KI tidak relevan atau sulit, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini menjadi penghalang besar bagi UMKM untuk memanfaatkan kebijakan ini secara maksimal. Selain itu, meskipun sistem e-filing telah disediakan, tidak semua UMKM memiliki keterampilan digital yang memadai untuk menggunakan sistem tersebut dengan efektif (Dewi & Asyhari, 2021).

Tabel 3: Kendala yang Dihadapi UMKM dalam Memanfaatkan Sistem e-Filing

Kendala	Deskripsi	Dampak terhadap Proses Pendaftaran
Pemahaman tentang KI	Kurangnya pengetahuan tentang KI	Pelaku usaha tidak merasa perlu untuk mendaftarkan produk
Keterbatasan keterampilan digital	Ketidakmampuan menggunakan e-filing	Proses pendaftaran menjadi terhambat, bahkan gagal
Biaya yang masih tinggi	Biaya pendaftaran yang tetap tinggi	UMKM enggan melanjutkan pendaftaran

Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas kebijakan ini, seperti akses terbatas terhadap informasi mengenai hak KI. Masih banyak UMKM di daerah terpencil yang tidak tahu bagaimana cara melindungi produk UMKM secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur pendaftaran KI telah disederhanakan, masih banyak pelaku usaha yang belum memanfaatkan kemudahan tersebut.

Peran Pemerintah dan Stakeholder dalam Mendukung UMKM

Untuk mengatasi kendala tersebut, peran pemerintah sangat penting dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada UMKM. Pemerintah harus meningkatkan upaya penyuluhan tentang pentingnya KI dan cara-cara untuk mendaftarkannya, terutama di daerah yang kurang terjangkau. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem informasi terkait KI, sehingga pelaku UMKM dapat lebih mudah mengakses data dan panduan mengenai prosedur pendaftaran. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan asosiasi UMKM juga sangat penting. Melalui kemitraan ini, sektor swasta dapat memberikan dukungan teknis dan keuangan bagi UMKM yang ingin mendaftarkan KI (Setiawan & Mulyani, 2022).

Tabel 4: Peran Stakeholder dalam Mendukung Pendaftaran KI UMKM

Stakeholder	Peran Utama	Bentuk Dukungan
Pemerintah	Penyuluhan, pelatihan, pembiayaan	Edukasi, subsidi biaya pendaftaran
Sektor Swasta	Penyediaan teknologi dan pendampingan	Dukungan teknis dan keuangan
Asosiasi UMKM	Advokasi dan pelatihan	Penyuluhan mengenai KI

Adanya kolaborasi tersebut, UMKM dapat lebih mudah mengakses sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melindungi inovasinya melalui pendaftaran KI yang lebih efisien dan efektif.

KESIMPULAN

Penyederhanaan prosedur pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) melalui Undang-Undang Cipta Kerja merupakan upaya strategis pemerintah untuk memperkuat daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun secara administratif kebijakan ini menawarkan kemudahan dan pengurangan biaya, implementasinya belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai kendala mendasar yang dihadapi UMKM dalam memanfaatkan perlindungan KI. Terutama, kurangnya pemahaman tentang KI, terbatasnya sumber daya manusia yang terampil, dan infrastruktur digital yang belum merata, menjadi hambatan signifikan bagi UMKM untuk memanfaatkan kebijakan ini secara optimal. Lebih lanjut, meskipun penyederhanaan prosedur memberikan peluang, masih banyak UMKM yang ragu untuk mendaftarkan KI karena kendala biaya dan pemahaman yang terbatas mengenai jenis-jenis hak KI. Dengan demikian, guna mengoptimalkan kebijakan ini, diperlukan kolaborasi lebih lanjut antara pemerintah, sektor swasta, dan asosiasi UMKM. Penyediaan pelatihan dan edukasi yang lebih intensif, baik secara digital maupun konvensional, serta skema pembiayaan yang lebih terjangkau, sangat penting agar UMKM dapat lebih mudah mengakses perlindungan KI. Selain itu, penelitian lebih lanjut mengenai dampak penyederhanaan prosedur ini terhadap keberlanjutan inovasi UMKM, serta efektivitas sistem e-filing dalam menjangkau daerah terpencil, menjadi langkah yang perlu diperhatikan untuk memperkaya kebijakan yang ada. Dengan demikian, meskipun tantangan masih ada, kebijakan ini berpotensi menjadi pendorong penting dalam mendorong inovasi dan perlindungan KI bagi UMKM, asalkan diiringi dengan solusi komprehensif yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Amin, M., & Widodo, W. (2019). Tantangan UMKM dalam melindungi kekayaan intelektual di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 110-125.
- Agustina, I., & Kusumawati, D. (2021). *Pendaftaran kekayaan intelektual di Indonesia: Peran dan tantangan bagi UMKM*. Jakarta: Penerbit Ilmu Ekonomi.
- Börner, K. (2020). The systematic literature review as a method for research synthesis: Benefits and limitations. *Journal of Knowledge Management*, 14(4), 252-269.
- Dewi, P. T., & Asyhari, M. (2021). Analisis kesadaran pelaku UMKM terhadap hak kekayaan intelektual. *Jurnal Hukum Bisnis*, 13(1), 45-60.
- Iskandar, A. (2020). Kekayaan intelektual dan pentingnya perlindungan hukum untuk UMKM. *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 8(3), 150-160.
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). *Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering*. EBSE Technical Report.
- Rama, R., & Setiawan, H. (2022). Dampak UU Cipta Kerja terhadap UMKM dan perlindungan kekayaan intelektual. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 11(1), 75-85.
- Setiawan, A. (2021). Pendaftaran merek dagang: Hambatan dan solusi bagi UMKM. *Jurnal UMKM Indonesia*, 5(2), 120-135.
- Setiawan, A., & Mulyani, S. (2022). Peran hak kekayaan intelektual dalam pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(4), 202-215.

- Sulistyo, S. (2021). UU Cipta Kerja dan kemudahan pendaftaran kekayaan intelektual untuk UMKM. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 14(2), 200-210.
- Suharto, T., & Suryani, M. (2020). Inovasi dan tantangan UMKM dalam perlindungan KI. *Jurnal Teknologi dan Bisnis*, 4(1), 30-50.
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207-222.